

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Strategi mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap aliansi Syarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR) dalam menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di kawasan Gunung Prakasak Padarincang memiliki karakteristik sendiri. SAPAR merupakan gerakan sosial yang tidak terstruktur atau informal di dalamnya yang muncul pada sekitar tahun 2015-2016. Siapa saja dapat ikut berkontribusi di dalam gerakan tersebut, tak terkecuali dari pihak pesantren seperti pengurus atau pengelola Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat dan beberapa pesantren lainnya yang ikut ke dalam kegiatan SAPAR. Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat bergabung dengan SAPAR pada tahun 2016 dan telah melakukan kegiatan-kegiatan bersama SAPAR dalam menolak pembangunan PLTPB di Padarincang. Berikut beberapa kesimpulan yang peneliti dapatkan dari strategi mobilisasi sumber daya Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap SAPAR dalam menolak pembangunan Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Padarincang.

Pertama, Sumber daya materiil yang dilakukan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap SAPAR adalah sumbangan semampunya. Sumbangan untuk kegiatan aksi SAPAR tidak dipatok kisaran. Siapa yang mampu membayar dapat memberikan sumbangan berapa pun. Kemudian, kegiatan sumbangan tersebut hanya diterapkan kepada pengelola atau pengurus pesantren saja, santri tidak dibebankan untuk memberikan sumbangan. Kemudian, di dalam SAPAR sendiri, pendanaan di dalam gerakan tersebut dikonfirmasi bersifat sukarela. Rasa kebersamaan dan sukarela. Pendanaan di dalam SAPAR tidak ada perbedaan terhadap aktor yang menyumbang, pendanaan digunakan untuk kepentingan semua pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan SAPAR.

Kedua, dalam sumber daya fasilitas, pesantren tidak memberikan bantuan logistik atau fasilitas kepada SAPAR. Akan tetapi, Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat memperbolehkan kegiatan diskusi dan konsolidasi bersama SAPAR di lingkungan pesantren. Kemudian, kegiatan SAPAR juga dilakukan di pesantren-

pesantren lainnya, hal itu dilakukan secara berotasi atau bergantian. Hal yang sama disampaikan oleh pihak SAPAR bahwa kegiatan konsolidasi dan diskusi dilaksanakan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa unsur paksaan, semua pihak dapat memberikan bentuk apa pun dalam menunjang kegiatan SAPAR.

Ketiga, sumber daya manusia, sumber daya manusia dapat direduksi menjadi tenaga para individu di dalam suatu gerakan sosial untuk merencanakan kegiatan-kegiatan serta mobilisasi. Pesantren Furu Arroudhotul melalui pengurus dan pengelola pesantren melakukan kampanye isu melalui teknik pintu ke pintu serta pengajian rutin. Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat tidak sendiri dalam melaksanakan sosialisasi isu penolakan PLTPB, tetapi ada tokoh masyarakat, ulama, dan pesantren lainnya yang turun dan melakukan kegiatan pengajian secara berpindah-pindah. Pihak SAPAR memberikan pernyataan bahwa SAPAR benar melaksanakan diskusi mengenai isu penolakan PLTPB dan tidak memaksa masyarakat untuk bergabung ke dalam kegiatan tersebut, individu yang ikut ke dalam kegiatan SAPAR berkumpul sendiri karena pandangan yang sama. Di sisi lain, aliansi SAPAR melakukan proses berjejaring dengan beberapa LSM yang memiliki pandangan yang sama dan kegiatan menonton bersama film terkait *geothermal*.

Keempat, sumber daya organisasi yang dilakukan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqat terhadap SAPAR. Sumber daya organisasi berupa struktur organisasi atau panitia yang dibentuk antara pesantren dengan SAPAR. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada struktur organisasi antara Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat dengan SAPAR. SAPAR sendiri merupakan wadah dan siapa saja dapat menjadi bagian dari wadah tersebut, termasuk individu-individu pesantren yang memiliki pandangan yang sama. Kemudian, santri-santri dengan sendiri ikut bergerak dalam isu penolakan PLTPB sesuai dengan apa yang disuarakan oleh para kya'I atau ulama. Para santri bergerak dan bersuara membela aspirasi masyarakat Padarincang bersama dengan para petinggi pesantren atau pengelola, seperti aksi masyarakat Padarincang dengan SAPAR ke kantor kementerian ESDM pada tahun 2019.

Kelima, kontribusi Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat dalam aspek sumber daya budaya. Sumber daya budaya adalah bagaimana gerakan sosial dibawakan melalui media apa pun, seperti musik, literatur, dan sebagainya. Hal yang berbeda terjadi pada sumber daya yang dibawakan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap isu penolakan PLTPB bersama SAPAR. Pesantren membawakan isu penolakan PLTPB melalui teknik ceramah atau khutbah dan *istighosah* kepada para Jemaah dan masyarakat Padarincang. Kkhutbah yang dibawakan mengambil referensi dari kitab suci Al'Quran. Dengan begitu, para Jemaah atau masyarakat dapat mengikuti dan menyimak mengenai isu penolakan PLTPB di Padarincang. Melalui nilai-nilai dalam ajaran Islam, pesantren dapat membawakan isu lingkungan di Padarincang secara tepat mengingat corak masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai Islam. Hal lain disampaikan oleh SAPAR, pesantren memiliki peran sebagai penentu apakah suatu aktivitas, dalam hal ini pembangunan PLTPB di sekitar lingkungan masyarakat, merupakan hal yang benar atau tidak. Pesantren hadir sebagai pihak yang dapat penyeimbang terhadap penilaian suatu hal melalui dalil akli dan nakli, yaitu pemahaman berdasarkan akal dan nilai ajaran agama. Kemudian, kegiatan *istighosah* juga dilaksanakan oleh pesantren dan SAPAR di lokasi sekitar Kawasan Gunung Prakasak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meminta pertolongan atau keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai tantangan yang sedang dihadapi. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh masyarakat Padarincang dalam menyuarakan isu penolakan PLTPB.

Keenam, sumber daya moral yang diberikan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap SAPAR. Dampak dukungan yang diberikan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat kepada SAPAR memperluas isu penolakan di masyarakat Padarincang itu sendiri. Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat dan beberapa pesantren yang ikut dalam gerakan penolakan PLTPB menambah dukungan terhadap SAPAR. SAPAR sendiri tidak membeda-bedakan di dalamnya, ketika satu pihak atau individu bergabung, tidak ada lagi baju-baju atau simbol yang membedakan mereka. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika beberapa individu bergabung dengan SAPAR, isu penolakan PLTPB dapat meluas melalui individu-individu yang bergabung ke dalam kegiatan SAPAR, seperti pengelola Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat yang secara tidak langsung memperluas isu

penolakan PLTPB di dalam ruang lingkup pesantren ketika mereka ikut kegiatan aliansi SAPAR. Selain, itu gerakan SAPAR yang didukung oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat dan pesantren lainnya mendapatkan legitimasi dukungan dari institusi lokal tersebut, hal tersebut dapat meningkatkan dukungan moral gerakan SAPAR.

Terakhir, sumber daya mobilisasi yang diberikan oleh Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat di dalam SAPAR memiliki cara yang berbeda dalam aspek sosialisasi dan mobilisasi dukungan. Pesantren melakukan istighosah dan ceramah dengan menggabungkan nilai-nilai ajaran Islam serta isu lingkungan kepada masyarakat. Pesantren juga berperan sebagai penyeimbang di dalam isu penolakan PLTPB, yaitu pihak yang memberikan penilaian terhadap suatu aksi menurut ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Kemudian, penduduk pesantren, seperti santri bergerak dan sadar dengan sendiri mengenai apa yang sedang diperjuangkan oleh SAPAR dan masyarakat Padarincang. Para santri sendiri bergerak menurut pandangan para petinggi atau kya'I terhadap isu penolakan PLTPB. Pesantren dengan SAPAR juga telah beberapa melakukan aksi konvensional, seperti *long march* ke kantor ESDM untuk mendapatkan jawaban mengenai pembangunan PLTPB di Padarincang. Akan tetapi, respon dari pemerintah masih belum memihak kepada masyarakat Padarincang.

Di sisi lain, penolakan yang dilakukan oleh aliansi SAPAR dapat membendung pembangunan PLTPB di Gunung Prakasak sampai waktu yang belum ditentukan. Aksi pencabutan tiang-tiang geothermal beberapa tahun lalu oleh SAPAR telah memberhentikan sementara proyek *geothermal* tersebut. Sementara dari pihak pemerintah, keberlanjutan proyek PLTPB masih belum menemukan pengembang baru setelah izin panas bumi dari PT SBG dikembalikan kepada Kementerian ESDM. Dengan begitu, proyek PLTPB di Padarincang masih belum menemukan titik akhir. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh SAPAR dan Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat sebagai salah satu pesantren yang ikut ke dalam aliansi SAPAR telah berhasil menunda pembangunan PLTPB di wilayah mereka.

Kemudian, dampak yang belum dan telah terjadi kepada masyarakat Padarincang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu lingkungan, budaya, dan sosial.

Dampak lingkungan menurut narasumber sudah dirasakan, seperti longsor dan banjir dalam beberapa waktu lalu. Kemudian, dampak sosial menimbulkan perselisihan antar warga yang pro terhadap pembangunan PLTPB dan yang menolak. Selanjutnya, dampak yang kemungkinan akan terjadi adalah budaya, budaya masyarakat Padarincang yang kental dengan nilai-nilai Islam akan terancam, jika pembangunan dilanjutkan oleh pihak asing yang masuk ke Padarincang. Kemudian, proyek pembangunan energi panas bumi sempat beberapa kali berhenti akibat penolakan dari seluruh masyarakat Padarincang. Hal tersebut memperlambat pengembangan proyek *geothermal* di Gunung Prakasak dan sekitarnya. Sampai saat ini, belum ada kelanjutan dari proyek tersebut dan masa izin pembangunan PLTPB oleh PT Sintesa Geothermal Banten yang masih belum diperbaharui.

5.2. Saran

Penelitian mengenai mobilisasi sumber daya yang dilakukan Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat terhadap gerakan SAPAR bukan menjadi akhir dari topik gerakan sosial yang berada di Padarincang. Penelitian ini masih memiliki kesempatan untuk dikembangkan di kemudian hari. Berdasarkan analisis peneliti di dalam penelitian ini, berikut beberapa saran terhadap pesantren Furu Arroudhotul Bqiat serta beberapa pesantren lainnya di Padarincang.

5.2.1. Saran Praktis

Pesantren Furu Arroudhotul Baqiat diharapkan dapat mencoba teknik kampanye isu penolakan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Padarincang melalui ruang digital. Diketahui bahwa individu yang ikut ke dalam SAPAR adalah sebagian dari pesantren dan elemen masyarakat lainnya, saran ini berlaku kepada SAPAR sebagai wadah gerakan sosial masyarakat Padarincang. Kemudian, kegiatan-kegiatan diskusi penolakan isu PLTPB di sela-sela acara pengajian, ceramah keagamaan, dan kegiatan *istighosah* merupakan cara yang efektif karena penggabungan ajaran agama terhadap isu lingkungan dapat dipahami oleh masyarakat Padarincang. Sosialisasi penolakan PLTPB di saat acara berkumpul bersama seperti pengajian dan *istighosah* diharapkan dapat dilanjutkan karena cara tersebut merupakan cara yang efektif sehingga masyarakat Padarincang sadar

memberikan dukungan penolakan proyek *geothermal* bersama atau di dalam SAPAR.

5.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini dapat membuka kesempatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam topik yang sama. Peneliti melihat bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga terdapat kebaruan dari segi penggunaan teori. Teori mobilisasi sumber daya memiliki batasan dalam aspek mengetahui hasil dari gerakan sosial serta bagaimana pentingnya identitas kolektif. Teori seperti kesempatan politik, identitas politik, dan pendekatan gerakan rimpang diharapkan dapat memberikan gambaran lain yang lebih mendalam mengenai topik yang sama.